

Bawaslu Dapat Tambahan Rp 675 Juta

SLEMAN (KR) - Adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bertambah. Penambahan ini karena adanya penyesuaian protokol kesehatan yang harus dilakukan dalam semua tahapan persiapan Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Sleman M Abdul Karim Mustofa mengatakan, dari hasil rapat, nominal yang kemudian disanggupi oleh Pemkab Sleman terkait dana hibah penyesuaian sebesar Rp 675.400.000. Jumlah tersebut, akan dialokasikan untuk beberapa kebutuhan tahapan Pilkada 2020 yang dibutuhkan Bawaslu. Misalnya kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer, penambah daya tahan tubuh,

sarung tangan hingga face shield. "Termasuk pengadaan baju hazmat di beberapa TPS khusus," ujarnya, Kamis (11/6). Karim menambahkan, sejumlah perlengkapan sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19 ini harus digunakan petugas dari Bawaslu di beberapa kegiatan. Seperti tahapan pengaktifan pengawas adhoc, tahapan Pilkada 2020 hingga menjelang pemungutan dan penghitungan suara. "Kalau besok tanggal 15 jadi diaktifkan Panwascam, maka paling dekat kebutuhan ini akan dipakai mereka. Tapi saat ini kita juga masih koordinasi dengan pemberi hibah untuk menunggu tindak lanjutnya," pungkasnya. (Aha)-f

Merasa Mampu, Warga Pilih Tak Terima BLT-DD

SEYEGAN (KR) - Untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu di tengah pandemi Covid-19, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Namun ada warga Klaci 3 Margoluwih Seyegan memilih tidak menerima BLT-DD karena merasa masih mampu dan mendapatkan penghasilan.

Mardi yang biasa bekerja sebagai petani memilih mengembalikan undangan dan tidak menerima BLT DD karena merasa mampu bekerja dan berusaha. "Lebih baik untuk yang lain yang membutuhkan sekali," terang Mardi, Kamis (11/6). Meski mengembalikan undangan, Mardi tetap berterimakasih kepada RT, RW, Dukuh dan pemerintah Desa Margoluwih karena sudah berniat memberikan bantuan kepadanya. "Mudah-mudahan yang saya lakukan ini bermanfaat bagi warga atau sebagian masyarakat yang lainnya," beber Mardi. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sleman Budiharjo

mengungkapkan, dalam penyaluran BLT-DD bulan pertama dilaksanakan dari tanggal 15 hingga 22 Mei 2020. Sasaran BLT-DD sebanyak 13.219 KK penerima manfaat. Data yang tidak tersalurkan sebanyak 268 KK. Budiharjo menjelaskan, latar belakang ada BLT-DD yang tidak tersalurkan karena adanya penerimaan ganda, sudah pindah alamat, meninggal dunia, dan juga ada yang menolak karena sudah mampu. "Yang menolak jumlahnya kurang lebih 15 hingga 20-an. Alasan yang mengembalikan bantuan tersebut kepada pemerintah desa dikarenakan yang bersangkutan merasa tidak berhak karena sudah mampu, masih kuat bekerja dan berusaha," paparnya. Budiharjo menambahkan, mereka yang menolak bantuan tersebut berharap bantuan itu dapat diberikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan. Pembagian BLT-DD ini berdasarkan SE Bupati Nomor 140/01043 tanggal 21 April 2020 hal Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). dan SE Bupati Nomor 140/01172 tanggal 6 Mei 2020 hal Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Besarnya bantuan tersebut Rp 600.000 yang diberikan selama tiga bulan, mulai dari bulan Mei, Juni dan Juli 2020. (Aha)-f

KSP SAHABAT MITRA SEJATI BANTU SEMBAKO

5.000 UKM Sleman Terdampak Covid-19



Danie Puspitaningrum menyerahkan paket sembako disaksikan Kadinkop UKM Sleman Pustopo.

SLEMAN (KR) - Pandemi Covid-19 telah memukul sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sleman. Dari sekitar 47.000 UKM, sebanyak 5.000 UKM telah melapor terkendala dampak Covid-19. Sementara untuk koperasi banyak yang terpaksa merumahkan karyawannya. "Macam-macam dampak pandemi

Covid-19 ini terhadap UKM. Ada yang kesulitan memasarkan produk, ada pula yang kesulitan mendapatkan bahan baku sehingga mereka terancam gulung tikar. Kami telah melaporkan masalah ini ke Kemenkop UKM supaya ada solusinya," ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sleman Pustopo

di sela penyerahan bantuan paket sembako untuk pelaku UKM di aula kantor setempat, Kamis (11/6). Bantuan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejahtera (KSP) Sahabat Mitra Sejahtera tersebut secara simbolis diserahkan oleh Area Manager KSP Sahabat Mitra Sejahtera area Jogja-Solo, Danie Puspitaningrum. Total ada 100 pelaku UKM Sleman mendapat bantuan paket sembako yang disalurkan melalui Dinkop UKM Sleman. Menurut Danie Puspitaningrum, bakti sosial untuk UKM ini diselenggarakan di seluruh Indonesia dengan tema 'Berbagi 10.000 Paket Sembako'. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian KSP Sahabat Mitra Sejahtera atas adanya pandemi Covid-19. "KSP Mitra Sahabat Mitra bergerak dalam bidang pembiayaan UMKM. Dan ketebulan di Sleman terdapat lebih dari 100 UMKM yang telah bermitra dengan kami. Paket sembako ini juga kami ambil dari anggota dan kami berikan juga untuk anggota dan pelaku usaha lainnya yang masih dalam kategori mikro," tambah Danie. (Has)-f

DI PASAR KOWEN SEPI PEMBELI

Pedagang Burung Merpati Kembali ke Godean

GODEAN (KR) - Para pedagang burung merpati kembali ke Pasar Godean saat pasaran Pon. Hal itu dikarenakan berjualan di Pasar Kowen Sidokarto, para pedagang mengaku sepi pembeli. Salah satu pedagang burung merpati, Mardi mengaku sudah sekitar 6-7 kali pasaran Pon berjualan di Pasar Godean. Pasalnya, lapak yang disediakan di Pasar Kowen terlalu masuk sehingga sepi pembeli. "Sudah hampir dua bulan ini, kami berjualan di Pasar Godean. Soalnya kalau berjualan di Pasar Kowen Sidokarto, sepi pembeli. Makanya kami kembali kesini," tuturnya. Pedagang lainnya Paimin mengatakan, dengan kembali berjualan di Pasar Godean, para pembelinya sudah mulai banyak. Meskipun saat berjualan di Pasar Godean, se-

ring ditertibkan oleh Sat Pol PP. "Tapi kami tetap di sini, karena di sini lebih ramai pembeli," terangnya. Terpisah, Kades Sidokarto H Istiyarto Agus Sutaryo membenarkan sudah beberapa waktu para pedagang burung merpati pindah berjualan di Pasar Godean. Pihaknya berharap kepada Pemkab Sleman segera men-



Para pedagang burung merpati berjualan di sekitar Pasar Godean pada saat pasaran Pon.

Dirlantas Polda DIY Sidak ke Polres Sleman



Kombes Pol I Made Agus Prasatya SIK MHum saat sidak di Satlantas Polres Sleman.

SLEMAN (KR) - Di sela-sela kesibukan memberi pelayanan kepada masyarakat menuju normal baru, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda DIY Kombes Pol I Made Agus Prasatya SIK MHum melakukan pemantauan layanan Satpas jajaran Polda DIY. Rabu (10/6), I Made Agus Prasatya beserta jajarannya inspeksi mendadak (sidak) di Satpas Polres

Sleman untuk melihat secara langsung pelayanan petugas Satlantas Polres Sleman kepada pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM). I Made Agus diterima Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto SIK SH MSI dan Kasat Lantans AKP Mega Tetuko SIK. Baik Kapolres Sleman maupun Kasat Lantans Sleman menegaskan di era normal baru, pelayanan

SIM di Satpas Polres Sleman tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yakni pembatasan jarak dan antrian, kelengkapan APK, dan pemakaian masker. I Made Agus mengapresiasi langkah Satlantas Polres Sleman dalam hal pelayanan SIM, utamanya mengenai inovasi 'One Web Service-Info Antrian'. "Inovasi ini sangat bagus dan membantu masyarakat yang berniat mengajukan permohonan maupun perpanjangan SIM. Diharapkan inovasi dari Satlantas Polres Sleman bisa dijadikan rujukan Satlantas Polresta/Polres di jajaran Polda DIY," ujarnya. I Made Agus terus meningkatkan pelayanan, dengan harapan antara polisi dan masyarakat bisa terjalin komunikasi yang baik di bidang pengabdian dan pengayoman. (Hrd)-f

Jemaah Ar-Raudhah Ikhlas Haji Ditunda

SLEMAN (KR) - Para calon haji peserta bimbingan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Ar-Raudhah mengaku ikhlas keberangkatannya haji tahun ini dibatalkan dan ditunda menjadi tahun depan. "Insya Allah kita bisa menerima dengan ikhlas, karena semua ini Gusti Allah yang mengatur," kata Siswanto, salah satu jemaah melalui WA sambil menambahkan "...nderek kemawon kalian program-program saking KBIHU Ar-Raudhah..." (ikut saja dengan program-program dari KBIHU Ar-Raudhah, Red). Sebelumnya, KBIHU Ar-Raudhah melayangkan surat resmi kepada mereka. Melalui surat bernomor 035/AR-DIY/2020 perihal pembatalan keberangkatan calon haji 1441 H yang ditandatangani Drs H Mulyanto MM (Ketua) dan H

Ahmad Lutfi SS MA (Sekretaris) antara lain dijelaskan, keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan haji diambil demi kemashlahatan para calon haji. Karena itu harus diterima dengan lapang dada. "Semoga ke depan ini kita semua calon jemaah yang bergabung di Ar-Raudhah khususnya dan di DIY tambah sehat, segar dan terus diberi kesabaran, sehingga pada tahun depan 1442/2021 kita semua dapat berangkat untuk melaksanakan ibadah haji...Aamiin...Aamiin...Aamiin," tulis Endin Basuni menanggapi surat dari KBIHU Ar-Raudhah. "Iya pak betul, nunggu setahun itu tidak lama, justru waktu 1 tahun menunggu,

Sebelum Dicairkan, Data BST Dimatangkan

SLEMAN (KR) - DPRD Kabupaten Sleman mendorong Dinas Sosial untuk mematangkan data Bantuan Sosial Tunai (BST) sebelum dicairkan. Mengingat BST merupakan 'sapu jagad' atau program terakhir pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Sleman M Zuhdan SPd mengatakan, dewan telah berkoordinasi dengan eksekutif terkait data calon penerima BST. Di mana sekarang ini 26.678 Kepala Keluarga (KK) yang akan memenuhi syarat menerima BST dari Kabupaten Sleman. "Kami minta kepada Dinas Sosial untuk mengecek kembali dan mematangkan data calon penerima BST. Jangan sampai ada ganda penerimaan bantuan," kata Zuhdan di Sleman, Kamis (11/6). Menurutny, BST ini merupakan 'sapu jagad' bagi warga yang terdampak Covid-19. Hal itu untuk memastikan warga yang terdampak mendapat bantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. "Jangan sampai ada yang tersisa tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Makanya data penerima harus matang," ujarnya. Menurut Zuhdan, jika data tidak matang dan masih ada yang terlewat, dukuh dan pengurus RT/RW yang akan menjadi beban. Mengingat dukuh dan RT/RW merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. "Para dukuh dan RT/RW akan jadi tumpuan masyarakat yang protes jika tidak mendapat bantuan. Saya minta betul, warga yang belum mendapat bantuan dari pusat, provinsi dan dana desa, harus mendapat BST. Supaya dukuh dan RT/RW tidak diprotes," tegasnya. (Sni)-f

Polres Sleman Bagikan 2.500 Kg Beras



Anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa diterjunkan untuk mendistribusikan bantuan.

SLEMAN (KR) - Polres Sleman membagikan 2.500 kg beras kepada 500 warga terdampak Covid-19, Kamis (11/6). Secara simbolis, bantuan diserahkan Irwasda Polda DIY Kombes Pol Adi Wibowo SH MH kepada perwakilan Bhabinkamtibmas dan Babinsa, disaksikan Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto SIK, Dandim 0732 Sleman Letkol Inf Diantoro. "Bantuan didistribusikan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa kepada masyarakat terdampak Covid-19, yang sama sekali belum menerima bantuan," jelas Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto. Sedang menurut Irwasda, baksos merupakan wujud nyata sumbangsih TNI dan Polri terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan serupa, juga diberikan oleh seluruh Polsek kepada warga kurang mampu. (Ayu)-f

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasarnya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

Pemulihan Ekonomi Melalui Pertanian

SLEMAN (KR) - Sektor pertanian merupakan sektor yang dampaknya sangat sedikit terhadap pandemi Covid-19 ini. Untuk itu pemerintah daerah perlu memberikan stimulan kepada para petani agar dapat mempertahankan ketahanan pangan di tengah pandemi. Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari PPP H Ngadiman SAg MSi mengatakan, selama pandemi Covid-19, sektor yang sangat minim terdampak adalah sektor pertanian. Mengingat pertanian ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. "Kalau sektor pertanian lainya terkenda dampak, tapi pertanian sangat minim. Soalnya semua orang butuh pangan," katanya, Kamis (11/6). Untuk itu, Ngadiman mendorong pemerintah daerah melakukan pemulihan ekonomi melalui sektor pertanian. Di antaranya memperkuat pemberian stimulan kepada kelompok-kelompok pertanian yang ada. "Anggaran stimulan untuk petani jangan dipotong dengan alasan penanganan Covid. Justru anggarannya kalau bisa ditambah supaya pertanian ini dapat mengangkat sektor ekonomi yang sempat terpuruk," ujarnya. Menurut Ngadiman, stimulan yang dapat dilakukan pemerintah daerah itu di antaranya pemberian bibit, subsidi pupuk dan bantuan pengolahan tanah. Melalui bantuan stimulan itu diharapkan para petani tetap semangat dalam menjaga ketahanan pangan. "Para petani ini garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan. Bagaimana pemerintah daerah itu selalu hadir untuk memberikan semangat kepada mereka (petani)," paparnya. Di samping pertanian, sektor pariwisata juga tak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam menghadapi normal baru, pemerintah perlu mendampingi para pelaku wisata. "Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dapat membantu APD, disinfektan dan penyuluhan tentang protokol kesehatan di tempat wisata. Bahkan juga ada simulasinya supaya para petugas bisa melaksanakan tugasnya dengan benar," ujar anggota dewan dari Dapil 3 Sleman ini. Ngadiman sangat optimis, jika kedua sektor itu digarap dan didampingi dengan baik, pemulihan ekonomi di Kabupaten Sleman akan cepat. Apalagi pertanian dan pariwisata menjadi sektor andalan Sleman. "Lumbung pangan di DIY itu terbesar ada di Sleman. Andalan PAD Sleman adalah pariwisata. Jadi tak salah kalau pemerintah daerah memberikan pendampingan terhadap dua sektor itu," pungkasnya. (Sni)-f

H Ngadiman SAg MSi
Anggota DPRD Sleman dari PPP

KR-Saifullah Nur Ichwan